

Dekonstruksi Sejarah G30S

Oleh: Hendra Kurniawan

HAMPIR genap setengah abad yang lalu tragedi nasional itu terjadi, namun hingga kini setiap kali peristiwa kelam itu dibicarakan pasti akan membangkitkan kepedihan banyak orang. Terutama bagi keluarga para jenderal yang dibunuh maupun keluarga korban dari tindakan selanjutnya yang mengatasnamakan pemulihan ketertiban dan keamanan. Korban yang disebut terakhir ini jumlahnya jauh lebih besar dan peristiwanya lebih mengerikan. Pembantaian massal terhadap ratusan ribu rakyat yang dituduh anggota PKI maupun simpatisan komunis di berbagai daerah merupakan tragedi kemanusiaan bagi bangsa ini.

Pada umumnya berbagai tulisan yang mengulas mengenai Peristiwa 1965 akhir-akhir ini masih memiliki kecenderungan untuk sepakat bahwa PKI adalah satu-satunya dalang. Demikian pula dengan buku-buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah masih mencantumkan istilah G30S/PKI. Penambahan embel-embel PKI pada G30S memiliki maksud untuk menegaskan bahwa tersangka utama dari peristiwa ini adalah mutlak PKI.

Padahal dalang atau otak intelektual dari peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal tersebut masih terus menyisakan pertanyaan besar. Pelaku lapangan yang bertindak sebagai eksekutor memang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Mereka ini sege-rombolan oknum militer yang dipimpin oleh Letkol Untung Samsuri. Tidak salah pula jika PKI disebut-sebut memiliki keterlibatan yang tidak sedikit dalam gerakan itu. Akan tetapi soal siapa desainer utama dari rangkaian tindakan politis ini hingga kini belum menemukan satu jawaban

yang pasti.

Pembicaraan mengenai Peristiwa 1965 semakin sering dilakukan pasca Orde Baru tumbang. Sejak tahun 1998, film wajib berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI* yang sempat menjadi film dengan biaya termahal pada masa itu, dihentikan pemutarannya pada seluruh saluran televisi setiap tanggal 30 September malam. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk membuka kemungkinan mengenai pemikiran dan versi-versi lain tentang dalang sesungguhnya dari peristiwa: memilikikan tersebut.

Film karya Arifin C. Noer itu selama ini menjadi sarana ampuh bagi rezim Orde Baru dalam menanamkan kebencian terhadap PKI dan menjadikan PKI sebagai *common enemy* yang wajib diwaspadai. Melalui film itu pula Orde Baru berusaha meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah penyelamat bangsa dari upaya perebutan kekuasaan yang hendak dilakukan oleh PKI.

Film ini benar-benar mengekspose kekejaman dan kebiadaban yang dilakukan oleh PKI dengan menyiksa para jenderal di Lubang Buaya. Suatu hal yang kemudian disangsikan kebenarannya oleh banyak pihak. Pada masa Orde Baru terjadi penyeragaman sejarah khususnya mengenai Peristiwa 1965. Hanya satu buku rujukan resmi pemerintah saat itu yakni *Buku Putih* terbitan Sekretariat Negara yang berjudul *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*.

Banyak versi

Setelah Orde Baru tidak lagi berkuasa maka eforia kebebasan benar-

benar tampak. Muncullah berbagai versi yang sebelumnya sempat dilarang oleh rezim Orde Baru maupun versi lain yang baru. Benedict Anderson dan Ruth T. McVey dalam *Cornell Paper* menyebutkan bahwa Peristiwa 1965 terjadi karena konflik intern dalam tubuh TNI Angkatan Darat. W. F. Wertheim lebih menyoroti kedekatan pribadi para pimpinan Gerakan 30 September 1965 seperti Letkol Untung dan Letkol Latief dengan Jenderal Soeharto.

Wertheim menduga bahwa Jenderal Soeharto sudah mengetahui akan terjadi penculikan terhadap para jenderal, terbukti Soeharto dengan sigap mampu mengatasi keadaan dan tidak ikut menjadi korban. Sementara itu Anthony C. A. Dake menganalisis Peristiwa 1965 berdasarkan keterangan dari Brigjen Sugandhi dan ajudan presiden Bambang Widjanarko di depan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Hasilnya mengejutkan karena Dake meyakini bahwa Presiden Soekarno sebenarnya telah mengetahui rencana tersebut sebelumnya.

Versi lain yang menarik dan akhir-akhir ini lebih didukung yaitu mengenai keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA. Peter Dale Scott mengungkapkan bahwa sejak dulu Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Soekarno sebagai presiden saat itu kebijakannya dinilai membahayakan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Dalam konteks Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, teori ini sangat beralasan. Kedua negara ini memiliki pertentangan paham dan saling be-

rebut kesempatan untuk menanamkan pengaruhnya masing-masing pada negara-negara lain yang ada di dunia.

Sekian banyak pemikiran dengan berbagai pengembangannya mengenai dalang dari Tragedi 1965 berusaha meyakinkan bahwa versinya adalah yang paling benar. Barangkali sungguh sulit untuk benar-benar menemukan jawaban yang paling tepat karena para pelaku sejarah tahun 1965 tersebut saat ini sudah banyak yang tiada. Akan tetapi setiap kemungkinan bisa saja benar sehingga jangan sampai ada yang mencoba menutup ruang-ruang diskusi dengan berpegang pada satu versi. Ingatlah bahwa pada akhirnya sejarah akan berkata jujur.

Sejarah mengenai Peristiwa 1965 perlu didekonstruksi. Tidak hanya melulu berkuat pada soal siapa dalangnya, namun juga mengangkahi sisi lain dari peristiwa tersebut. Misalnya tentang bagaimana nasib para korban pembantaian massal yang terjadi sesudah 1 Oktober 1965. Demikian pula dengan para tahanan politik di masa Orde Baru yang dituduh terlibat Peristiwa 30 September 1965 dan harus menjalani hukuman tanpa proses persidangan yang jelas. Perlu juga mengupayakan rekonsiliasi nasional tentang peristiwa ini bagi semua pihak yang terlibat. Tak perlu ada lagi kecurigaan perbedaan perlakuan, hingga pengucilan dalam masyarakat hanya karena mereka keturunan dari kelompok atau tokoh tertentu. Terakhir yang terpenting ialah jangan sampai tragedi kemanusiaan macam ini terulang kembali. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta